

Hf.
393.093
WAW
M
-98

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU-LINTAS BERAKIBAT MATINYA ORANG LAIN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
menyelesaikan program studi strata 1 Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

HERRY PRAMONO WAWOLANGI

NIM : 92.20.915

NIRM : 92.6.111.01000.50053

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
1998

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU-LINTAS
YANG BERAKIBAT MATINYA ORANG LAIN

Skripsi ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum



(PETRUS SOERJOWINOTO, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

LEMBAR PENGESAHAN

Diperlakukan dan diterima didepan Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum

Semarang, 25 November 1998

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ENDANG WAHYATI, S.H., M.H.

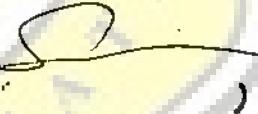
Ketua

Y. BUDI SARWO, S.H., M.H.

Sekretaris

Dewan Pengaji :

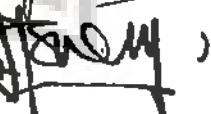
1. (PETRUS SOERJOWINOTO, S.H., M.Hum)

()

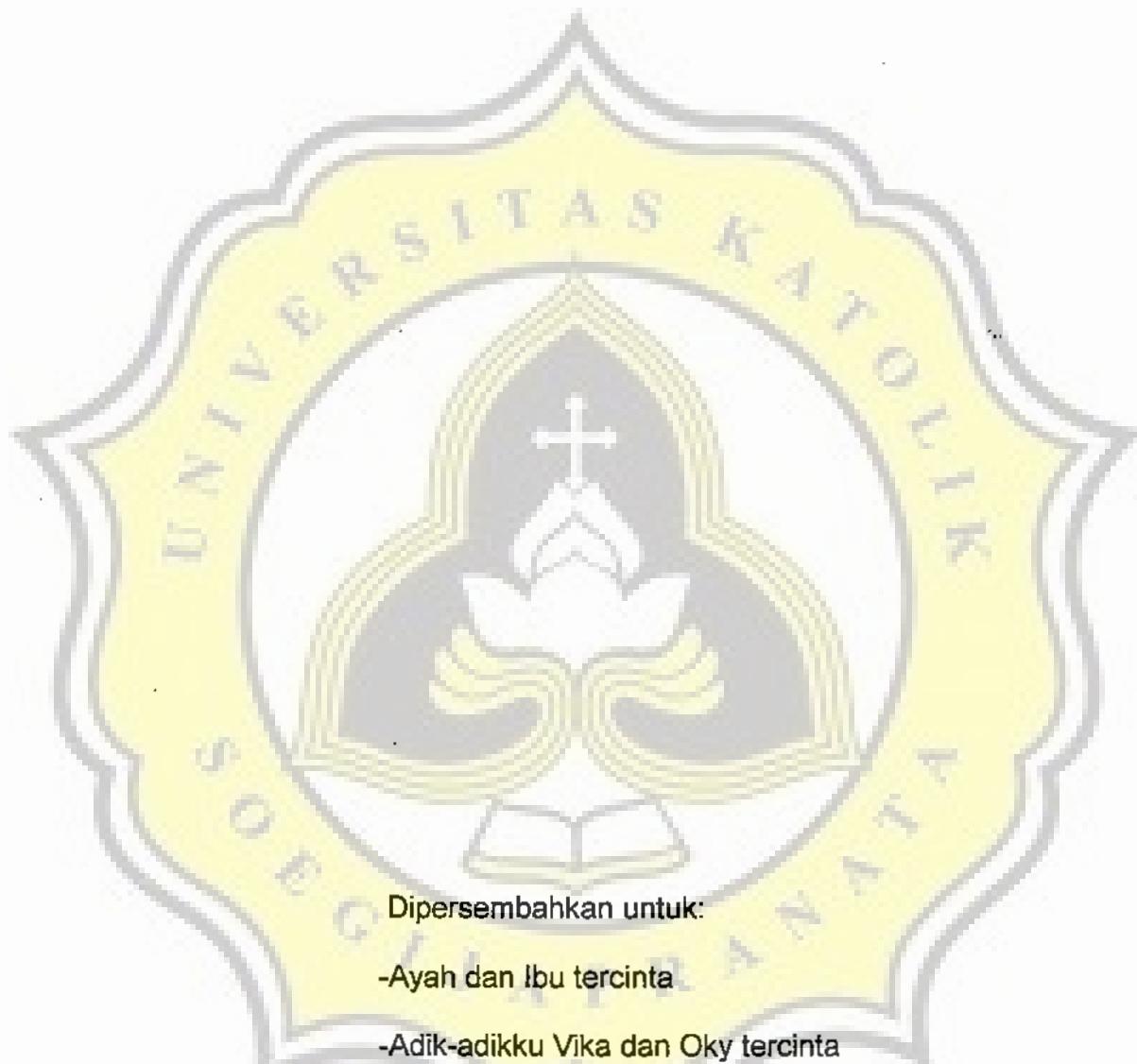
2. (SRI HARTINI, S.H., C.N.)

()

3. (Y. BUDI SARWO, S.H., M.H.)

()

LEMBAR PERSEMPAHAN



Dipersembahkan untuk:

- Ayah dan Ibu tercinta
- Adik-adikku Vika dan Oky tercinta
- Francisca Riana Kurniasari, S. E tercinta
- Almamaterku Fakultas Hukum UNIKA Semarang

KATA PENGANTAR

Dengan memanfaatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa disertai dengan segala kesungguhan dan kemampuan yang ada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul:

"MEKANISME PENEGAKAN HUKUM DALAM KECELAKAAN LALU-LINTAS YANG BERAKIBAT MATINYA ORANG LAIN"

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan namun hal tersebut tidak mengurangi maksud uraian pokok yang sebenarnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Endang Wahyati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesungguhan dan kesabaran telah membimbing dan memberi arahan petunjuk serta saran-saran yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Marcella Elwina, S.H., selaku Dosen pembimbing II
4. Bapak Kasatlantas Kodya Semarang yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian di Satlantas Kodya Semarang

5. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Semarang yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang.
6. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
7. Ayah dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dorongan dan dukungan doa, sampai dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Adik-adikku Vika dan Oky tercinta yang selalu memberikan dukungan dalam doa.
9. Francisca Riana Kurniasari, S.E., tercinta yang tidak pernah lelah dan selalu memberikan dukungan semangat dan doa.
10. Civitas Akademika Fakultas Hukum UNIKA Semarang, khususnya angkatan 1992.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi yang jauh dari sempurna ini, dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis sendiri, akan tetapi bermanfaat juga bagi pembaca pada umumnya, dan almamater pada khususnya.

Semarang, 12 November 1998

Penyusun

ABSTRAKSI

Pada keadaan yang serba cepat dan praktis ini, ternyata peranan hukum pidana sudah tidak lagi terbatas pada apa yang dilakukan dalam penyelenggaraan proses peradilan, tetapi telah menyebar ke seluruh aspek kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa. Hal tersebut disebabkan karena orang semakin menggantungkan dirinya terhadap sesuatu yang mereka sebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. MPR, selaku pemegang kedaulatan rakyat memberikan amanatnya kepada presiden dalam kedudukannya sebagai mandataris, tentang pokok-pokok pembinaan dan pembangunan hukum dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN Tahun 1998. Pembangunan hukum pada GBHN Tahun 1998 tersebut intinya menyatakan bahwa pembangunan dan pembinaan hukum yang dapat menciptakan kondisi yang mantap, bila pelaksanaan penegakan hukum dan aparat penegak hukum yang berkualitas serta bertanggung jawab ditingkatkan secara konsekuensi dan konsisten, sehingga para anggota masyarakat dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.

Pembangunan dan pembinaan hukum tidak terlepas oleh timbulnya kendala, baik hal tersebut disebabkan oleh segi penegak hukum maupun dari segi pelaku tindak kecelakaan lalu-lintas, maupun tidak menutup

hukum, sehingga pembangunan hukum, yang dicantumkan dalam GBHN Tahun 1998 dapat terlaksana dengan baik.



DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul Skripsi.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Skripsi	6
BAB II : INTRODUKSI TEORI.....	8
A. Tinjauan Umum Mekanisme Penegakan Hukum	8
B. Tinjauan Tentang Prosedur Penahanan	10
1. Pengertian Penahanan	10
2. Syarat-syarat Penahanan	11
3. Jenis-jenis Penahanan	13
4. Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Penahanan	14

5. Penangguhan Penahanan	17
C. Tinjauan Kecelakaan Lalu-lintas Berakibat Matinya Orang	
Lain	18
BAB III : METODE PENELITIAN.....	23
A. Metode Pendekatan.....	23
B. Spesifikasi Penelitian.....	23
C. Penentuan Sampel.....	24
D. Metode Pengumpulan Data	24
E. Metode Analisa Data	26
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH.....	27
A. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terdapat Atau Tidaknya Penahanan Dalam Perkara Kecelakaan Lalu-Lintas Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain	27
B. Prosedur Penahanan Terhadap Perkara Kecelakaan Lalu- Lintas Yang Berakibat Matinya Orang Lain	42
C. Kendala-kendala Dalam Penegakan Hukum Sehubungan Dengan Perkara Kecelakaan Lalu-lintas Yang Berakibat Matinya Orang Lain Di Wilayah Kota Madya Semarang	51
BAB V : PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA